



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

#### Pasal 2

ASB bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. mewujudkan anggaran belanja yang efektif dan efisien; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

#### Pasal 3

ASB dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efisiensi, ekonomis, efektifitas, manfaat, kewajaran, kepatutan dan kebutuhan.

### BAB II

#### ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD dalam penyusunan RKA SKPD wajib berpedoman pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. definisi;
  - b. pengendali belanja;
  - c. satuan pengendali belanja tetap;
  - d. satuan pengendali biaya variabel; dan
  - e. formula perhitungan belanja total.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeliharaan bangunan/gedung/kantor/rumah dinas;
  - b. jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas;
  - c. penyusunan dokumen lingkup SKPD;
  - d. pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelatihan teknis bagi Aparatur;
  - f. sosialisasi, penyuluhan bagi Masyarakat;
  - g. penyusunan dokumen lingkup Daerah;
  - h. penyusunan, penetapan dokumen Peraturan Daerah;
  - i. monitoring Pengawasan/supervisi/pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan antar SKPD;

- j. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. pemetaan/penelitian/pendataan;
- l. rapat koordinasi/evaluasi/rapat forum SKPD; dan
- m. pembinaan/pendampingan/fasilitasi/pemberdayaan Masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023

↳ BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line that ends in a small hook.

JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

Rumusan ASB untuk masing-masing jenis kegiatan sebagai berikut:

I. Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Rumah Dinas

Definisi:

Pemeliharaan bangunan/gedung/kantor/rumah dinas adalah kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan/gedung/kantor/ rumah dinas yang secara rutin/berkala yang dibiayai dengan dana APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia jasa pemeliharaan.

a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Unit Bangunan yang dipelihara.

b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) adalah Rp19.629.318.75 Per Kegiatan

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) adalah Rp29.278.881.30 Per Unit Bangunan yang Dipelihara

d. Formula Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Formula Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah Rp 19.629.318.75 + (Rp 29.278.881.30 x Unit Bangunan yang Dipelihara)

Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honor Non PNS	1.86	3.51	5.16
2	Honor Panitia Pelaksana	0.39	0.39	0.39
3	Honor Tim Pengadaan	0.16	0.16	0.16
4	Belanja Bahan/Material	21.94	21.94	21.94
5	Cetak dan Penggandaan	-	-	-
6	Bahan Habis Pakai	22.41	24.90	27.39
7	Belanja Pemeliharaan	-	28.19	76.18

8	Belanja Modal	-	-	-
9	Belanja Jasa Kantor		-	-
10	Belanja Jasa Tenaga	1.78	20.92	40.05
		48.54	100,00	171.27

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan Kegiatan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Dinas Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Rumah Sakit Daerah Kabupaten	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rumah Sakit Daerah Kabupaten	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Perumahan Dan	Pemeliharaan rutin/berkala
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan
Dinas Ketahanan Pangan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Lingkungan Hidup	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Perhubungan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Perikanan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Transmigrasi Dan Ketenagakerjaan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Aru Tengah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Aru Tengah Timur	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
Kecamatan Aru Tengah Selatan	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
Inspektorat Kabupaten	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Badan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

## II. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

### Definisi:

Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas adalah kegiatan pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan dan KIR untuk kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang dimiliki SKPD.

#### a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

#### b. Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost}

Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost} adalah Rp144.268.496,73 Per Kegiatan

#### c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) adalah Rp11.282.319,90 x Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah  
 $Rp144.268.496.73 + (Rp\ 11.282.319.90 \times \text{Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4})$

Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Jasa Servis	31.00	20.96	41.96
2	Suku Cadang	3.42	5.68	10.08
3	Bahan Bakar	64.92	35.68	97.53
4	Berizinan	0.66	1.15	-
5	Makan dan Minum	-	-	-
6	Honor	-	-	-
		100,00	63,47	149,57

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas/operasional
Rumah sakit daerah kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pemadam Kebakaran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Sosial	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas lingkungan Hidup	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Perikanan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pertanian	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Pulau-Pulau Aru	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Kecamatan Aru Selatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Aru Selatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan aru utara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan ARU Tengah Timur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kecamatan Aru Tengah selatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan ARU Selatan Timur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan ARU Selatan Utara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Sir-Sir	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Inspektorat Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Badan Perencanaan, Penelitian	Pemeliharaan Rutin/Berkala
Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Badan pendapatan daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III. Penyusunan Dokumen Lingkup SKPD (Renstra, Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan, dan Laporan Capaian Kinerja)

Definisi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup SKPD adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen (misalnya: Renstra, Renja, RKA/DPA, Laporan Keuangan, Laporan Capaian Kinerja, dan lain sebagainya) yang dilaksanakan secara mandiri untuk kepentingan SKPD tersebut.

a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Dokumen

b. Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost}

Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost} adalah Rp202.594.643.45Per Kegiatan

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) adalah Rp199.101.632.35 x Jumlah Dokumen

d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah Rp202.594.643.45 + (Rp 199.101.632.35 x Jumlah Dokumen)

Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	11.24	9.06	13.41
2	Honor Non PNS	0.63	0.19	1.06
3	Penggandaan	11.59	7.45	15.74
4	Bhn Hbs Pakai	6.91	6.60	5.84
5	Makanan Dan Minuman	4.91	3.98	19.46
6	Perjalanan Dinas	34.52	25.91	40.06
7	Sewa	1.15	0.21	2.09
8	Jasa Konsultansi	29.05	17.82	37.21
		71.23	100	134.87

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyusunan Sistem Informasi database Bidang kebudayaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Perencanaan Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong
Dinas Pemadam Kebakaran	Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
Dinas Ketahanan Pangan	Penyusunan Kajian Pengembangan Ekonomi
Dinas Ketahanan Pangan	Penyusunan Master Plan Pembangunan Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi Kabupaten Kepulauan Aru
Dinas Komunikasi dan Informatika	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Dinas Perikanan	Penyusunan data Statistik Perikanan dan Pengembangan Informasi Kelautan dan Perikanan
Dinas Pertanian	Penyusunan Program Penyuluhan Pada Tingkat Kecamatan
Sekretariat Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan Bupati

Sekretariat Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah
Sekretariat Daerah	Penyusunan Propemperda di Lingkup Pemerintah kabupaten kepulauan Aru
Sekretariat Daerah	Penyusunan Profil Potensi Investasi
Sekretariat Daerah	Penyusunan Publikasi Inflasi Daerah
Sekretariat Daerah	Penyusunan Sistem Pendaftaran tanah
Sekretariat Daerah	Penyusunan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten kepulauan Aru
Sekretariat Daerah	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Sekretariat Daerah	Penyusunan Analisis Beban Kerja
Sekretariat Daerah	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
Sekretariat Daerah	Fasilitasi Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kecamatan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
Kecamatan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa
Kecamatan	Musyawarah Perencanaan
Kecamatan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan
Inspektorat Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD
Inspektorat Kabupaten	Sosialisasi dan Penyusunan LHKPN
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Indikator Kinerja dan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Database Perumahan Daerah
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis RDTR Kota Dobo

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis RDTR Kecamatan Aru Tengah
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis RDTR Kecamatan Aru Selatan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Rancangan RKPD
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP)
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Kebijakan Umum dan PPAS APBD
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Indikator Kinerja Kunci
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Dokumen Revitalisasi IKM
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Master plan Investasi Daerah
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Kajian Pengolahan Hasil Sumber daya Perikanan di Kabupaten Kepulauan ARU
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Dokumentasi Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Dokumentasi Kajian Roadmap Pendidikan Kabupaten Kepulauan ARU
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Database Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penyusunan Database Bidang Pendidikan dan Kependudukan dan SDM
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Optimalisasi Pengembangan aset dan Penyusunan Laporan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penyusunan Laporan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pendampingan Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawab Bendara
Badan Kepegawain, Pendidikan dan	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Badan Kepegawain, Pendidikan dan	Penyusunan Profil Kepegawaian
Badan Kepegawain, Pendidikan dan	Penyusunan Formasi ASN

#### IV. Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Definisi:

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi umum perkantoran di SKPD Dinas.

a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) dihitung dari Jumlah Peserta dan Lama Waktu Pelaksanaan (Hari)

b. Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost}

Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost} sebesar Rp104.939.709,38 per Kegiatan

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) adalah Rp246.241.91 per Jumlah Pegawai

d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) Rumus/formula

Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah  $Rp104.939.709,38 + (Rp\ 246.241.91 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Lama Waktu Pelaksanaan (hari)})$

Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	0.60	0.40	0.81
2	Honor Non PNS	-	0.00	-
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.48	1.27	1.90
4	Bhn Habis Pakai	0.97	0.72	1.22
5	Bahan dan Material	0.22	0.08	0.35
6	Makanan Dan Minuman	4.37	3.49	5.50
7	Perjalanan Dinas	35.45	28.43	44.61
8	Transport Peserta	-	0.00	-
9	Uang Saku	-	0.00	-
10	Belanja Jasa Kantor	41.88	5.45	80.82
11	Belanja Kursus / Diklat	16.32	8.49	25.13
12	Sewa Gedung	1.13	0.88	1.46
13	Sewa Alat	0.62	0.48	0.75

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Kesehatan	Pendidikan Dan Pelatihan Kader Malaria
Dinas Kesehatan	Pelatihan Bagi Tenaga Koordinator Imunisasi
Dinas Kesehatan	Pelatihan Bagi Petugas SIK Puskesmas
Rumah Sakit Daerah Kabupaten	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Dinas Pemadam Kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dinas Pemadam Kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Laporan Pencapaian SDGS dan Aru Plan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	Diklat Teknis Analisis Intelejen BIN
Satuan Pamong Praja	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Sosial	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Dinas Sosial	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
Dinas Sosial	Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Dinas Sosial	Pelatihan Sistem Aplikasi Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial	Pelatihan Pengelolaan Data PMKS Berbasis Non Panti dan Di Luar Rumah Tangga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bimbingan Teknis Khusus Mitigasi Kebencanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bimbingan Teknis Khusus Dan Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat
Dinas Ketahanan Pangan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Ketahanan Pangan	Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal dan gerakan konsumsi pangan local
Dinas Lingkungan Hidup	Bimtek Aparatur Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelatihan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Kelurahan
Dinas Perhubungan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Pelatihan Kewirausahaan
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Pelatihan Pengolahan Produk Unggulan Ekonomi Produktif Masyarakat
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan Bagi Pengelola Industri Pariwisata
Dinas Pertanian	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Pelatihan Pengelolaan Hasil Perikanan
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Pelatihan Pembuatan Aneka Keripik
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Dinas Transmigrasi Dan Ketenagakerjaan	Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Sekretariat Daerah	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum Dan	Pelatihan Penyusunan Peraturan Daerah
Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	Bimtek Dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa
Kecamatan Aru Utara	Pelatihan Kepemimpinan Bagi
Kecamatan Aru Utara	Aparatur Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Aru Selatan	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kecamatan Aru Selatan	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Kecamatan Aru Tengah Timur	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kecamatan Aru Tengah Timur	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Kecamatan Aru Tengah Timur	Pelatihan PKK
Kecamatan Aru Selatan Utara	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kecamatan SIR-SIR	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kecamatan SIR-SIR	Pelatihan PKK
Inpektorat Kabupaten	Pelatihan Dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Indikator Kinerja Dan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pelatihan Dan Sinkronisasi Data Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Aplikasi
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pelatihan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Tingkat Desa
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pelatihan Pengoperasian Sistem Aplikasi Simda Barang (SIMBADA) Tingkat SKPD
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara SKPD di STAN
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Pelatihan Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Magang Penatausahaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Kursus-Kursus Dan Pelatihan Singkat
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Pelatihan Keuangan Daerah Bagi Aparatur (Bendahara) Desa
Badan Pendapatan Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Badan Kepegawaian Dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Badan Kepegawaian Dan Pelatihan	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi bagi PNS Daerah

Badan Kepegawaian Dan Pelatihan	Pendidikan Penjenjangan Struktural
Badan Kepegawaian Dan Pelatihan	Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II
Badan Kepegawaian Dan Pelatihan	Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III
Badan Kepegawaian Dan Pelatihan	Diklat Prajabatan CPNSD Golongan III
Badan Kepegawaian Dan Pelatihan	Pelatihan Achievement Motivating Training

#### V. Pelatihan Teknis Bagi Aparatur

##### Definisi:

Pelatihan teknis bagi Pegawai atau Aparatur adalah suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi Pegawai/Aparatur sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan ketrampilan yang bersifat teknis yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

##### a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Peserta dan Lama Waktu Pelatihan (Hari)

##### b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) adalah Rp196.167.782,42 Per Kegiatan

##### c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) adalah Rp810,70 Per Jumlah Peserta dan Lama Waktu Pelatihan

##### d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah  $Rp196.167.782,42 + (Rp\ 810,70 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Lama Waktu Pelatihan (Hari)})$

##### Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	1.36	0.68	2.03
2	Honor Non PNS	-	-	-
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.08	2.07	4.10

4	Bhn Hbs Pakai	1.67	1.19	2.13
5	Bahan dan Material	-	-	-
6	Makanan Dan Minuman	9.56	6.82	12.87
7	Perjalanan Dinas	72.67	42.70	107.00
8	Transport Peserta	-	-	-
9	Uang Saku	-	-	-
10	Belanja Barang yang di serahkan kepada	-	-	-
11	Belanja Jasa Kantor	7.54	7.13	14.64
12	Belanja Kursus/Diklat	3.00	-	6.02
13	Sewa Gedung	0.75	0.23	1.28
14	Sewa Mobilitas	0.28	0.15	0.41
15	Sewa Alat	0.39	0.06	0.72
		100	60,98	150,49

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	Diklat Teknis Analisis Intelejen BIN
Dinas Lingkungan Hidup	Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bimbingan Teknis Khusus Mitigasi Kebencanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bimbingan Teknis Khusus dan Penanganan Bencana Berbasis
Sekretariat Daerah	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
Kecamatan	Magang Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu
Kecamatan	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Kecamatan	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Kecamatan	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
Kecamatan	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Kecamatan	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
Kecamatan	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Indikator Kinerja dan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pelatihan dan Sinkronisasi Data Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Aplikasi E-Planing
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pelatihan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Tingkat Desa
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pelatihan Pengoperasian Sistem Aplikasi Simda Barang (SIMBADA) Tingkat SKPD
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara SKPD di STAN
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Magang Penatausahaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Kursus-Kursus dan Pelatihan Singkat
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pelatihan Keuangan Daerah Bagi Aparatur (Bendahara) Desa
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

## VI. Sosialisasi, Penyuluhan Bagi Masyarakat

### Definisi:

Kegiatan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada kelompok atau masyarakat. Sedangkan Kegiatan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, pemahaman, tujuan, tindakan dan kepercayaan.

#### a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Peserta dan Lama Waktu Pelaksanaan (Hari)

#### b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) sebesar Rp118.352.181,51 Per Kegiatan

#### c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) sebesar Rp211.205,67 Per Jumlah Peserta dan Lama Waktu Pelaksanaan

#### d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumusan Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah  $Rp118.352.181.51 + (Rp. 211.205,67 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Lama Waktu Pelaksanaan})$

### Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	3.63	1.92	5.34
2	Honor Non PNS	1.04	-	0.10
3	Penggandaan	7.05	5.06	9.03
4	Bhn Hbs Pakai	6.61	3.64	9.59
5	Makanan Dan Minuman	10.52	8.16	12.88
6	Perjalanan Dinas	58.81	48.58	72.57
7	Transport peserta	-	-	-
8	Uang Saku	-	-	-
9	Sewa	0.70	0.48	0.91
10	Sewa Gedung	4.52	3.34	5.69
11	Sewa Alat	0.22	0.58	1.08
12	Jasa Kantor	7.30	8.65	14.04

13	Belanja Kursus	0.31	0.07	0.52
14	Belanja Modal	-	-	-
		100	80,49	131,75

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sosialisasi peraturan perundang-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sosialisasi dana BOS
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Dinas Kesehatan	Sosialisasi Makanan Jajanan bagi Anak Sekolah
Dinas Perumahan dan Pemukiman	Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perumahan
Dinas Perumahan dan Pemukiman	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Satuan Polisi Pamong Praja	Sosialisasi Peran dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja	Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman
Dinas Sosial	Sosialisasi HIV AIDS dan Narkoba
Dinas Sosial	Sosialisasi bagi Anak anak
Dinas Sosial	Sosialisasi PKH
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi Undang Undang Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi Resiko Bencana Tsunami dan Rambu Rambu
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak	Sosialisasi dan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak	Penyuluhan ketrampilan dan jati diri bagi ibu rumah tangga dalam
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Dinas Perhubungan	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Dinas Perikanan	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dalam pendayagunaan
Dinas Pertanian	Penyuluhan Peranan Pertanian
Dinas Pertanian	Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sosialisasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sosialisasi Perdagangan Dalam
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Perlindungan
Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Sosialisasi tentang proses
Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Sosialisasi Bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Sekretariat Daerah	Sosialisasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
Kecamatan Pulau Pulau Aru	Sosialisasi Peraturan Perundang
Kecamatan Aru Utara	Sosialisasi Peran dan Fungsi
Kecamatan Sir Sir	Sosialisasi Peraturan Perundang
Kelurahan Galay Dubu	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
Inspektorat Kabupaten	Sosialisasi dan Penyusunan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan tentang Pengelolaan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Sosialisasi Peraturan Kementerian tentang Pedoman Penyusunan
Badan Pendapatan Daerah	Sosialisasi Pajak dan Retribusi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Sosialisasi Peraturanerundang
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pembinaan dan Sosialisasi Narkoba/HIV pada ASN

## VII. Penyusunan Dokumen Lingkup Daerah

### Definisi:

Kegiatan penyusunan dokumen adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa yang mendalam. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh daerah bukan hanya bagi SKPD yang telah menyusunnya.

a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Dokumen

b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yaitu Rp145.515.805,15 Per Kegiatan

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) yaitu Rp134.283.802,91 Per Jumlah Dokumen

d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) yaitu  $Rp145.515.805,15 + (Rp\ 134.283.802,91 \times \text{Jumlah Dokumen})$

Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	5.20	3.45	6.95
2	Honor Non PNS	-	-	-
3	Penggandaan	9.69	7.66	11.73
4	Belanja Material	-	-	-
5	Bhn Hbs Pakai	4.51	2.71	4.32
6	Makanan Dan Minuman	3.22	5.07	7.82
7	Perjalanan Dinas	58.40	49.99	74.44
8	Sewa	0.23	-	0.46
9	Belanja Kursus/Pelatihan	-	-	-
10	Jasa Konsultasi	18.83	0.25	37.39
		100,00	69,14	143,10

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Sekretariat daerah	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sekretariat daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
Sekretariat daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Sekretariat daerah	Penyusunan PROPEMPERDA di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Sekretariat daerah	Fasilitasi dan Pemetaan Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kecamatan
Sekretariat daerah	Penyusunan profil potensi investasi
Sekretariat daerah	Penyusunan publikasi inflasi daerah
Sekretariat daerah	Penyusunan sistem pendaftaran tanah
Sekretariat daerah	Pemutakhiran Data Infrastruktur Perbatasan
Sekretariat daerah	Penyusunan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Sekretariat daerah	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Sekretariat daerah	Penyusunan Analisis Beban Kerja
Sekretariat daerah	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
Sekretariat daerah	Fasilitasi Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kecamatan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
Kelurahan	Pendataan Penduduk Tingkat Kelurahan
Inspektorat Kabupaten	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

### VIII. Penyusunan, Penetapan Dokumen Peraturan Daerah

Definisi:

Kegiatan penyusunan/ penetapan dokumen Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun/ menetapkan sebuah dokumen Peraturan Daerah, (baik berupa laporan, rancangan dan sebagainya).

#### a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Dokumen

b. Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost}

Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost} adalah Rp36.220.254.36 Per Kegiatan

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) yaitu Rp111.102.221.29 x Jumlah Dokumen

d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah  $Rp36.220.254.36 + (Rp 111.102.221.29 \times \text{Jumlah Dokumen})$

Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	8.19	4.29	12.11
2	Honor Non PNS	-	-	-
3	Penggandaan	46.32	29.69	62.95
4	Bhn Hbs Pakai	2.27	1.32	3.23
5	Makanan Dan Minuman	5.89	8.79	13.23
6	Perjalanan Dinas	37.21	27.47	49.16
7	Sewa	-	-	-
8	Jasa Konsultasi	-	-	-
		100	71,56	140,67

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Sekretariat Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
Sekretariat Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Sekretariat Daerah	Penyusunan PROPEMPERDA di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

IX. Monitoring Pengawasan/Supervisi/ Pemantauan/Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Antar SKPD Lingkup Kabupaten Kepulauan Aru

## Defenisi

Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk membandingkan rencana/standar dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilakukan di lingkungan Kabupaten Kepulauan Aru (antar SKPD).

### a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Lokasi x Jumlah Dokumen

### b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) sebesar Rp139.360.762,32 Per Kegiatan

### c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) yaitu Rp1.910.045,07 x Jumlah Lokasi x Jumlah Dokumen

### d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah  $Rp139.360.762,32 + (Rp1.910.045,07 \times \text{Jumlah Lokasi} \times \text{Jumlah Dokumen})$

## Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	0.04	-	0.01
2	Honor Non PNS	0.21	-	0.41
3	Pengadaan	0.86	0.62	1.11
4	Bahan Habis Pakai	2.46	1.19	3.74
5	Makanan dan Minuman	6.06	0.01	0.13
6	Belanja Sewa sarana	6.50	3.89	9.51
7	Transportasi Perjalanan Dinas	95.77	78.74	112.81
		100	84,45	127,21

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Kesehatan	Monitoring dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kesehatan Per Semester
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Satuan Polisi Pamong Praja	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
satuan Polisi Pamong Praja	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Sosial	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Penggulangan Bencana Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Daerah Pasca Bencana
Dinas Ketahanan pangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan SKPD
Dinas lingkungan Hidup	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah
Dinas lingkungan Hidup	Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan RKL, RPL, UKL/UPL dan SPPL
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Perhubungan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Komunikasi dan Informatika	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dinas Pemuda Dan Olahraga	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Perikanan	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan SDKP
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pertanian	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas perdagangan dan Perindustrian	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bahan Pokok dan Startegi
Dinas perdagangan dan Perindustrian	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
Sekretariat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Fisik
Sekretariat Daerah	Monitoring bantuan Rumah Ibadah
Sekretariat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kecamatan Pulau - Pulau ARU	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kecamatan ARU Tengah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kecamatan ARU Selatan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PKK di Tingkat Desa/Kecamatan
Kecamatan ARU Tengah Selatan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke Desa-Desa
Kecamatan ARU Seelatan Timur	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kecamatan ARU Selatan Utara	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kecamatan Aru Utara Timur	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Perencanaan, Penelitian dan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Pendapatan daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

## X. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

### Definisi:

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan penempatan sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

#### a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) sebesar Jumlah Orang

#### b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yaitu Rp415.856.819,32 Per Kegiatan

#### c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) Rp6.528.982,66 x Jumlah Orang

#### d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) Rp415.856.819,32 + (Rp 6.528.982,66 x Jumlah Orang)

### Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	10.92	6.72	15.12
2	Honor Non PNS	-	-	-
3	Cetak dan Penggandaan	2.60	1.85	3.35
4	Bhn Hbs Pakai	0.53	0.21	0.85
5	Makanan Dan Minuman	3.82	1.48	6.17
6	Perjalanan Dinas	76.40	46.78	118.25
7	Jasa Penyiaran	-	-	-
8	Belanja Jasa Kantor	3.96	1.43	6.48
9	Gedung	0.66	-	1.31
10	Alat	1.12	0.37	1.88
		100	58,83	153,41

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Sekretariat Daerah	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Sekretariat Daerah	Penyusunan Analisis Beban Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Seleksi Penerimaan CPNS
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pelantikan Pejabat ASN
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pengurusan Karpeg, Taspen, dan Satya Lencana
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Seleksi Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Penyusunan Profil Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Penyusunan Formasi ASN

XI. Pemetaan/ Penelitian/ Pendataan

Definisi:

Pemetaan/penelitian/pendataan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pengumpulan, pengolahan, analisis dan/atau pemetaan data dasar yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses penyusunan rencana pembangunan di daerah.

a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Dokumen

b. Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost}

Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost} adalah Rp171.462.270,76 Per Kegiatan

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) adalah Rp155.874.791,60 Jumlah Dokumen

d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah Rp171.462.270,76 + (Rp 155.874.791,60 x Jumlah Dokumen)

Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	0.74	0.16	1.33
2	Makan dan Minum	1.37	0.20	2.54
3	Cetak dan Penggandaan	0.98	0.34	1.61
4	Bhn Hbs Pakai	34.54	21.94	47.16
5	Perjalanan Dinas	49.38	23.64	88.42
6	Belanja Jasa Kantor	12.99	-	25.98
7	Belanja Modal	-	-	-
		100.00	46,28	167,03

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Rakyat	Pendataan dan Pengawasan Ormas
Dinas Sosial	Pemetaan Sosial KAT
Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum)	Pembentukan Kecamatan
Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum)	Pembentukan Kabupaten Aru Perbatasan
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum Dan HAM)	Fasilitasi dan Pemetaan Tapal Batas Wilayah
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum Dan HAM)	Fasilitasi dan Pemetaan Desa Adat
Kecamatan Aru Utara	Pengembangan / Penataan Desa
Kelurahan Galay Dubu	Pendataan Penduduk Tingkat Kelurahan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Badan Pendapatan daerah	Pendataan Objek/Subjek Pajak Dan Retribusi Daerah
Badan Pendapatan daerah	Penyempurnaan Peta Blok

## XII. Rapat Koordinasi/Evaluasi/Rapat Forum SKPD

### Definisi:

Rapat Koordinasi/Evaluasi/Rapat Forum SKPD bertujuan untuk Membangun/memantapkan kesamaan pemahamanpersepsi tentang pentingnya sinergitas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang professional dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan tugas seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

#### a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Hari dan Jumlah Materi

#### b. Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost}

Satuan Pengendali Belanja Tetap {Fixed Cost} Rp337.057.554,59 Per Kegiatan

#### c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) adalah Rp3.333.380,42 x Jumlah Hari x Jumlah Materi

#### d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah Rp337.057.554,59 + (Rp 3.333.380,42 x Materi x Hari)

### Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas (%)	BatasAtas (%)
1	Honor PNS	0.70	0.36	1.03
2	Honor Non PNS	0.48	-	0.94
3	Uang Lembur	-	-	-
4	Penggandaan	0.15	0.07	0.21
5	Bhn Hbs Pakai	0.05	0.01	0.10
6	Makanan Dan	0.46	0.21	0.70
7	Perjalanan Dinas	97.96	83.71	124.47
8	Sewa	0.04	0.01	0.08
9	Biaya Konsultansi	-	-	-
10	Jasa Kantor	0.16	0.06	0.25
11	Belanja Modal	-	-	-
		100	84,44	127,79

Data Yang Diolah

SKPD	Nama Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kesehatan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rumah Sakit Daerah Kabupaten	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pemadam Kebakaran	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Satuan Polisi Pamong Praja	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Sosial	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Ketahanan Pangan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Lingkungan Hidup	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perhubungan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perikanan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pertanian	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Penelusuran Batas Wilayah Administarsi
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah	Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Sekretariat Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Sekretariat DPRD	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Sekretariat DPRD	Hearing / Dialog dan Koordinasi
Sekretariat DPRD	Konsultasi dan Koordinasi DPRD
Kecamatan Pulau Pulau Aru	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Aru Tengah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Aru Selatan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Aru Utara	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Aru Tengah Timur	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Aru Tengah Selatan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Aru Selatan Timur	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Aru Selatan Utara	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Sir Sir	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Galay Dubu	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Inspektorat Kabupaten	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Inspektorat Kabupaten	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komperhensif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi Penataan Ruang
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi penelitian dan pengembangan Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Rapat Koordinasi Sarana dan Prasarana Wilayah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Pendapatan Daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

XIII. Pembinaan/Pendampingan/Fasilitasi/Pemberdayaan Masyarakat

Definisi:

Kegiatan Fasilitasi/ pendampingan/ pembinaan/ pemberdayaan pada lembaga/organisasi adalah sebuah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi/dibina/diberdayakan.

a. Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah Jumlah Peserta x Hari

b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) adalah Rp119.530.283,98 Per Kegiatan

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) adalah Rp193.058,45 Per Jumlah Peserta dan Hari

d. Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost)

Rumus Penghitungan Belanja Total (Total Cost) adalah  $Rp119.530.283.98 + (Rp 193.058,45 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Hari})$

Proporsi Alokasi Obyek Belanja

No.	Ojek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor PNS	-	-	-
2	Honor Non PNS	5.86	2.72	9.01
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-
4	Bhn Hbs Pakai	3.66	2.66	4.65
5	Bahan dan Material	2.84	1.95	3.75
6	Makanan Dan Minuman	7.32	3.95	10.69
7	Perjalanan Dinas	10.68	6.00	15.36
8	Transport Peserta	55.77	51.84	71.94
9	Uang Saku	-	-	-
10	Belanja Jasa Kantor	-	-	-
11	Belanja Modal	5.56	3.49	7.64
12	Belanja Barang yang di serahkan kepada Masyarakat	0.44	-	0.88
13	Belanja Kursus/Pelatihan	0.49	-	0.99
14	Belanja Perawatan	0.24	-	0.48

Dinas perikanan	Pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Dinas pertanian	Pendampingan penyuluh pertanian terhadap budidaya tanaman padi
Dinas pertanian	Pembinaan dan peningkatan / pengembangan tanaman pangan
Dinas pertanian	Pembinaan dan peningkatan / pengembangan tanaman hortikultura
Dinas pertanian	Pembinaan dan peningkatan / pengembangan tanaman perkebunan
Dinas pertanian	Penerapan teknologi usaha tani melalui pendampingan dan penyuluhan pada sekolah lapang pertanian tanaman terpadu
Dinas pertanian	Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih balai tanaman pangan
Dinas pertanian	Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih balai tanaman hortikultura
Dinas pertanian	Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih balai tanaman perkebunan
Dinas pertanian	Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih balai tanaman peternakan
Sekretariat daerah	Pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan
Sekretariat daerah	Pembinaan batas wilayah administrasi pemerintahan
Sekretariat daerah	Fasilitasi sosialisasi dan pembinaan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Sekretariat daerah	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Sekretariat daerah	Pembinaan dan pengembangan umat beragama
Sekretariat daerah	Pembinaan mental dan spiritual
Sekretariat daerah	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Kecamatan	Pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Kecamatan	Pembinaan dan pengembangan pkk
Kecamatan	Pembinaan 10 program pokok tp-pkk
Kecamatan	Pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Kecamatan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Kecamatan	Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat
Kecamatan	Pembinaan aparatur pemerintah desa dan bpd
Kecamatan	Pembinaan dan pengembangan pkk
Kecamatan	Pembinaan dan pengembangan pkk
Kecamatan	Pembinaan 10 program pokok tp-pkk
Kelurahan	Pembinaan dan pengembangan pkk
Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pendampingan tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara
Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pendampingan pengoperasian sistem manajemen keuangan daerah (simda) tingkat SKPD
Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan sosialisasi narkoba / hiv pada ASN

↳ BUPATI KEPULAUAN ARU,

  
 JOHAN GONGGA